



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(CALK)**

PEMERINTAH KECAMATAN NEGARA
TAHUN 2025



KABUPATEN JEMBRANA

KATA PENGANTAR

Dengan segala puja dan puji syukur kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa / Tuhan Yang Maha Esa, atas Anugrah dan Karunia-Nyalah Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Tahun 2025 Pemerintah Kecamatan Negara disusun mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 merupakan langkah untuk menyempurnakan pengelolaan keuangan berdasarkan identifikasi masalah dalam Pengelolaan Keuangan Daerah yang terjadi dalam pelaksanaannya selama ini. Penyempurnaan pengaturan tersebut juga dilakukan untuk menjaga 3 (tiga) pilar tata Pengelolaan Keuangan Daerah yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif.

Semoga apa yang dituangkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Tahun 2025 ini dapat dijadikan pedoman bagi perangkat daerah Kecamatan Negara dalam Pelaksanaan baik dalam Pembinaan Pembangunan dan Kemasyarakatan di Kecamatan Negara serta dalam Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang akuntabel.

Negara, 31 Desember 2025
Camat Negara,



 **Gede Wariyana Prabawa, S.STP., M.M.**
NIP. 198612302006021001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penyusunan Laporan Keuangan	1
1.2 Maksud Dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan OPD Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana	2
1.3 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan OPD Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana	3
1.4 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan OPD Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana	6
BAB II : IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH	8
2.1 Kebijakan Keuangan	8
2.1.1 Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah	8
2.1.2 Kebijakan Pembangunan Daerah	9
2.2 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD	12
BAB III : IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN OPD KECAMATAN NEGARA KABUPATEN JEMBRANA	16
3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan OPD Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana	16
3.2 Rincian Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan OPD	20
3.3 Hambatan dan kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target Kinerja.....	27
BAB IV : PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN DAERAH.....	29
4.1 Rincian Dari Penjelasan Masing-Masing Pos-Pos Pelaporan Keuangan OPD Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana	29
4.2 Pos-Pos Laporan Operasional	37
4.3 Pos-Pos Neraca	44
4.4 Laporan Perubahan Ekuitas 2025	52
4.5 Pengungkapan Atas Pos–Pos Aset Dan Kewajiban Yang Timbul Sehubungan Dengan Penerapan Basis Akrual Atas Pendapatan Dan Belanja Dan Rekonsiliasinya Dengan Penerapan Basis Kas, Untuk Etintas Akuntansi atau Pelaporan Menggunakan Basis Akrual Pada OPD Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana	53
BAB V : PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN OPD KECAMATAN NEGARA KABUPATEN JEMBRANA	55
BAB VI : PENUTUP	55



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK) OPD KECAMATAN NEGARA KABUPATEN JEMBRANA TAHUN ANGGARAN 2025

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Laporan Keuangan

Terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah merupakan dinamika dalam perkembangan Pemerintahan Daerah dalam rangka menjawab permasalahan yang terjadi pada Pemerintahan Daerah. Perubahan kebijakan Pemerintahan Daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan dampak yang cukup besar bagi berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemerintahan Daerah, termasuk pengaturan mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah.

Diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 merupakan langkah untuk menyempurnakan pengelolaan keuangan berdasarkan identifikasi masalah dalam Pengelolaan Keuangan Daerah yang terjadi dalam pelaksanaannya selama ini. Penyempurnaan pengaturan tersebut juga dilakukan untuk menjaga 3 (tiga) pilar tata Pengelolaan Keuangan Daerah yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif.

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. Pertanggungjawaban Keuangan Daerah diwujudkan dalam bentuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Laporan keuangan tersebut merupakan wujud dari penguatan transparansi dan akuntabilitas. Terkait dengan pertanggungjawaban Keuangan Daerah, paling sedikit ada 7 (tujuh) laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah yaitu Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih,

Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Selain berbentuk laporan keuangan, pertanggungjawaban Keuangan Daerah juga berupa laporan realisasi Kinerja. Melalui laporan ini, masyarakat bisa melihat sejauh mana Kinerja Pemerintah Daerahnya. Selain itu, laporan ini juga sebagai alat untuk menjaga sinkronisasi dari proses perencanaan hingga pertanggungjawaban yang dilakukan Pemerintah Daerah. Melalui laporan ini Pemerintah Daerah bisa melihat hal yang harus diperbaiki untuk kepentingan proses penganggaran dan perencanaan di tahun berikutnya.

Dalam penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2025, OPD Kecamatan Negara telah mengaplikasikan SAP berbasis akrual. SAP Berbasis Akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis kas yang ditetapkan dalam APBD. Laporan keuangan ini terdiri dari :

1. Laporan Realisasi Anggaran;
2. Laporan Perubahan SAL;
3. Neraca;
4. Laporan Operasional;
5. Catatan atas Laporan Keuangan.

1.2 Maksud Dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan OPD Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana

Laporan keuangan OPD Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh OPD Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana. Tujuan penyusunan laporan keuangan OPD Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, dan kinerja keuangan Inspektorat Kabupaten Jembrana yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Selain itu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan tujuan sebagai berikut :

- a. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;

- b. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil- hasil yang telah dicapai;
- d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas akuntansi/pelaporan mendanai seluruh keiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
- e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber -sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
- f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan;
- g. Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaam sumber daya keuangan/ ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit -Laporan Operasional (LO), aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas suatu entitas pelaporan.

1.3 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan OPD Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana

- 1. Landasan Idiil yaitu Pancasila;
- 2. Landasan Konstitusional yaitu UUD 1945;
- 3. Landasan Operasional :
 - a. Tap MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas dari KKN;
 - b. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - c. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Peraturan Perpajakan (Lembaran

Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

- d. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- e. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);
- f. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- g. Undang-undang Nomor 76 Tahun 2024 tentang Kabupaten Jembrana di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7013);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara 6523);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- k. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor

33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 63);

- l. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampiannya (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 547);
- p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);
- q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 450);
- r. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2016 Nomor 64, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 51) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 5);
- s. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2022 Nomor 3);

- t. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2024 Nomor 10);
- u. Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 59);
- v. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 63 Tahun 2020 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2020 Nomor 63);
- w. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 38 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2024 Nomor 39);.
- x. Peraturan Bupati Jembrana No. 07 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati No. 38 2024 tentang Penjabaran Anggaran pendapatan dan belanja daerah Tahun Anggaran 2025.
- y. Undang-undang No. 5 Tahun 2024 tentang pemeriksaan pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara.
- z. Peraturan Pemerintah (PP) No. 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional, bertujuan menyelaraskan keuangan pemerintah pusat dan daerah.

1.4 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan OPD Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana

Dalam Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan OPD Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana Tahun 2025 terdiri dari :

BAB I : PENDAHULUAN 1

- 1.1 Latar Belakang Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2 Maksud Dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan OPD Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana
- 1.3 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan OPD Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana
- 1.4 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan OPD Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana

BAB II : IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

- 2.1 Kebijakan Keuangan
 - 2.1.1 Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah
 - 2.1.2 Kebijakan Pembangunan Daerah
- 2.2 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

BAB III : IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN OPD KECAMATAN NEGARA KABUPATEN JEMBRANA

- 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan OPD Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana
- 3.2 Rincian Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan OPD

BAB IV : PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN DAERAH

- 4.1 Rincian Dari Penjelasan Masing-Masing Pos-Pos Pelaporan Keuangan OPD Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana
- 4.2 Pos-Pos Laporan Operasional
- 4.3 Pos-Pos Neraca
- 4.4 Laporan Perubahan Ekuitas 2025
- 4.5 Pengungkapan Atas Pos–Pos Aset Dan Kewajiban Yang Timbul Sehubungan Dengan Penerapan Basis Akrua! Atas Pendapatan Dan Belanja Dan Rekonsiliasinya Dengan Penerapan Basis Kas, Untuk Etintas Akuntansi atau Pelaporan Menggunakan Basis Akrua! Pada OPD Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana

BAB V : PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN OPD KECAMATAN NEGARA KABUPATEN JEMBRANA

BAB VI : PENUTUP

BAB II

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

2.1 KEBIJAKAN KEUANGAN

Dalam menjalankan Kebijakan Keuangan OPD Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana Tahun 2025 dan untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan Tahun Anggaran OPD Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana memperoleh Alokasi Dana APBD sebesar Rp. 10.234.808.849,00 (Sepuluh Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Empat Juta Delapan Ratus Delapan Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah), berupa Belanja Pegawai Rp.6.055.446.306,00 (Enam Milyar Lima Puluh Lima Juta Empat Ratus Empat Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Enam Rupiah), Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp.3.645.658.543,00 (Tiga Milyar Enam Ratus Empat Puluh Lima Juta Enam Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah) dan Belanja Modal sebesar Rp.533.704.000,00 (Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Empat Ribu Rupiah). Untuk tahun 2025 terdiri dari 5 (lima) program, 13 (Tiga Belas) kegiatan dan 37 (Tiga Puluh Tujuh) Sub Kegiatan sebagaimana tertuang dalam Tabel 1.

2.1.1 Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah

Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Karena sifatnya mengurangi aset, maka belanja daerah antara lain harus mampu meningkatkan nilai tambah (added value) dari setiap pembelanjaan yang dilakukan, sehingga dapat menjadi lebih berdaya guna dalam pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026. Belanja Daerah Tahun 2025 ditekankan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Jembrana.

Belanja Daerah Tahun 2025 berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Tahun 2025 yang telah disinkronasikan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Bali serta pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Daerah menentukan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, organisasi perangkat daerah maupun

program dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektivitas dan memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolak ukur dan target kinerja. Perubahan kebijakan diarahkan sebagai berikut :

A. Perubahan kebijakan belanja tidak langsung daerah diarahkan pada :

1. Penyesuaian belanja pegawai meliputi belanja gaji dan tunjangan, belanja tambahan penghasilan PNSD, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah;
2. Penyesuaian belanja non pegawai meliputi belanja hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa, belanja bantuan keuangan dan belanja tak terduga.

B. Perubahan kebijakan belanja langsung daerah diarahkan pada :

1. Penyesuaian alokasi anggaran belanja yang bersumber dari pendapatan yang penggunaannya bersifat spesifik;
2. Penambahan anggaran atas kebutuhan kegiatan yang dipandang urgent dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD Tahun Anggaran berjalan;
3. Penyesuaian (pergeseran/pengurangan) alokasi anggaran OPD, PPKD dan BLUD yang dipandang lebih mengefektifkan pelaksanaan kegiatan.

2.1.2 Kebijakan Pembangunan Daerah

Kebijakan pembangunan pasca Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Jembrana Tahun 2025 yang telah disinkronasikan dengan RKP dan RKPD Provinsi Bali serta mempertimbangkan Tema pembangunan Kabupaten Jembrana Tahun 2025 yaitu ***“Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana dalam Bali Era Baru di Kabupaten Jembrana menuju Jembrana Maju, Harmoni, dan Bermartabat dengan Membangun Manusia, Alam, Budaya”***

Selanjutnya dirumuskan prioritas pembangunan tematik Kabupaten Jembrana Tahun 2025 adalah mengedepankan peningkatan manusia, alam, dan budaya, dengan program prioritas seperti pendidikan, kesehatan, daya beli, pertanian, infrastruktur, dan pelayanan publik.

Beberapa kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan tersebut, sebagai berikut :

1. Penguatan Ekonomi dan Daya Beli, Peningkatan kesejahteraan melalui pengembangan sektor rill, pertanian, perikanan, serta infrastruktur pendukung;
2. Membangun Manusia, Fokus pada peningkatan kualitas Pendidikan, Kesehatan, dan sumber daya manusia;
3. Pelestarian Alam dan Budaya, Pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan dan penguatan kearifan local, termasuk tradisi seperti Makepung;
4. Infrastruktur Berkelanjutan, Pembangunan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan dan konektivitas;
5. Tata Kelola Pemerintahan, Penguatan data melalui Forum Satu Data untuk pengambilan Keputusan yang lebih baik;
6. Program Prioritas, Pendidikan, Kesehatan, Daya Beli, Agama & Budaya, Pertanian, Infrastruktur & Lingkungan, Kesejahteraan Sosial, dan Pelayanan Publik;

Tabel 1. Program dan Kegiatan yang didanai APBD Kabupaten Jembrana pada OPD Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana TA. 2025

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB.KEGIATAN		JUMLAH DANA (Rp)	
			APBD Awal	APBD Perubahan
I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		7.316.050.693,-	7.232.642.456,-
	1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.369.000,-	0,-
	a.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	527.000,-	0,-
	b.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	385.000,-	0,-
	c.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	325.000,-	0,-
	d.	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	612.500,-	0,-
	e.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	570.500,-	0,-
	f.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	432.500,-	0,-
	g.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	516.500,-	0,-
	2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.174.542.043,-	6.056.038.306,-

	a.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.171.033.539,-	6.055.446.306,-
	b.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	825.000,-	0,-
	c.	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1.165.650,-	0,-
	d.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir tahun SKPD	653.500,-	0,-
	e.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	864.300,-	592.000,-
	3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2.400.000,-	0,-
	a.	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2.400.000,-	0,-
	4.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	16.450.000,-	24.150.000,-
	a.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	16.450.000,-	24.150.000,-
	5.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	351.537.050,-	359.769.750,-
	a.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.219.500,-	7.293.000,-
	b.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	40.000.000,-	22.500.000,-
	c.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	246.044.100,-	256.093.000,-
	d.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	18.691.450,-	12.043.750,-
	e.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.440.000,-	0,-
	f.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.800.000,-	0,-
	g.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	29.342.000	61.840.000,-
	6.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	72.000.000,-	72.000.000,-
	a.	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	72.000.000,-	72.000.000,-
	7.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	562.648.800,-	562.928.800,-
	a.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.950.000,-	1.950.000,-
	b.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	178.198.800,-	160.378.800,-
	c.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	382.500.000,-	400.600.000,-
	8.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	133.103.800,-	157.755.600,-
	a.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	107.598.500,-	134.331.500,-
	b.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.950.000,-	12.450.000,-
	c.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	7.605.300,-	4.024.100,-
	d.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	6.950.000,-	6.950.000,-

			atau Bangunan Lainnya		
II.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			2.638.949.172,-	2.864.834.093,-
	1.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		18.824.000,-	8.040.000,-
		a.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6.740.000,-	6.240.000,-
		b.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.084.000,-	1.800.000,-
	2.	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		2.620.125.172,-	2.856.794.093,-
		a.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	800.000.000,-	800.000.000,-
		b.	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	1.820.125.172,-	2.056.794.093,-
III.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			1.435.100,-	0,-
	1.	Koordinasi Penerapan Penegakan Peraturan Daerah dan Peratyrn Kepala Daerah		1.435.100,-	0,-
		a.	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1.435.100,-	0,-
IV.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			107.907.000,-	135.737.000,-
	1.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum sesuai penugasan Kepala daerah		107.907.000,-	135.737.000,-
		a.	Pembinaan Wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia	25.907.000,-	75.907.000,-
		b.	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	82.000.000	59.830.000
V.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA			2.279.300,-	0,-
	1.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi pembinaan dan Pengawasan Pemerintah daerah		2.279.300,-	1.595.300,-
		a.	Fasilitasi, Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	2.279.300,-	1.595.300,-

2.2 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Indikator Pencapaian Target kinerja APBD pada SKPD OPD Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana sebagaimana ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) adalah sebagaimana tercantum dalam Tabel 2.

Tabel 2. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD OPD Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2025

No	Program/Kegiatan/Sub.Kegiatan		Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pencapaian Kinerja
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
	1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Tersusun	7 Sub Kegiatan	100 %
		a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0 Dokumen	Dokumen
		b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0 Dokumen	Dokumen
		c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0 Dokumen	Dokumen
		d. Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	0Dokumen	Dokumen
		e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	0 Dokumen	Dokumen
		f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar dan Realisasi Kinerja SKPD	0 Laporan	Laporan
		g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Ecvaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0 Laporan	Laporan
	2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5 Sub Kegiatan	100 %
		a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	47 Orang	100 %
		b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	0 Dokumen	100 %
		c. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	0 Dokumen	100 %
		d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0 Laporan	100 %
		e. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/TriwulN/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keungan Bulanan / Triwulan/ semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	1 Laporan	100 %
	3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	1 Sub Kegiatan	100 %

		a.	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	0 Dokumen	Laporan
	4.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Pemenuhan Sarana Prasarana Disiplin aparatur	1 Sub Kegiatan	100 %
		a.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	69 Paket	100 %
	5.	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Prosentase Terpenuhi Adminstrasi Umum dan Sarana Prasarana Perangkat Daerah	7 Sub Kegiatan	100 %
		a.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Kompenen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	28 Paket	100 %
		b.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	100 %
		c.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik kantor yang Disediakan	36 Paket	100 %
		d.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket	100 %
		e.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan Yang Disediakan	0 Dokumen	100 %
		f.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	0 Laporan	100%
		g.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	92 Laporan	100 %
	6.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Terpenuhi Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pada Perangkat Daerah	1 Sub Kegiatan	100 %
		a.	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	100 %
	7.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terpenuhi Barang dan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah di Kecamatan Negara	3 Sub Kegiatan	100 %
		a.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100 Laporan	100 %
		b.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	100 %
		c.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	100 %
	8.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara	4 Sub Kegiatan	100 %
		a.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraaan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	34 Unit	100 %
		b.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	31 Unit	100 %
		c.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	25 Unit	100 %
		d.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	100 %
II. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						
	1.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Desa dalam Peningkatan Partisipasi	2 Sub Kegiatan	100 %

			Masyarakat Dalam Pembangunan		
	a.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa	1 Lembaga Kemasya- katan	95 %
	b.	Peningkatan Efiktifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	95 %
	2.	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Prosentase Capaian Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	2 Sub Kegiatan	100 %
	a.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yng Terbangun	4 Unit	95 %
	b.	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas/O rmas	95 %
III. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					
	1.	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1 Sub Kegiatan	100 %
	a.	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya dibidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Inadonesia	Jumlah Laporan Koordinasi / Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan fungsinya di Bidang Penegakan dan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	100 %
IV. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					
	1.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Prosentase Terlaksananya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	2 Sub Kegiatan	100 %
	a.	Pembinaan Wawasan Kebangsaan Dan Ketahanan Nasional Dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keytyhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	7 Orang	100 %
	b.	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	100 %
V. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA					
	1.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1 Sub Kegiatan	100 %
	a.	Fasilitasi, Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Yang Difasilitasi Dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	8 Dokumen	100 %

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN OPD KECAMATAN NEGARA KABUPATEN JEMBRANA

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan OPD

Berdasarkan kebijakan keuangan yang telah ditetapkan dalam Kebijakan Umum APBD Pemerintah Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2025, ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan Daerah Pemerintah Kecamatan Negara adalah sebagai berikut :

- Belanja Daerah terealisasi sebesar Rp. 9.982.342.023,- atau 97,53% dari jumlah anggaran sebesar Rp. 10.234.808.849,- sehingga masih ada tersisa sebesar Rp. 252.466.826,- atau 2,47% yang terdiri dari :
 1. Belanja Operasi terealisasi sebesar Rp 9.464.078.023,00 atau 97,56%, dari anggaran yang disediakan sebesar Rp. 9.701.104.849,00 sehingga masih ada tersisa sebesar Rp.237.026.826,00 atau 2,44%
 2. Belanja Modal terealisasi sebesar Rp. 518.264.000,00 atau 97,11% dari Jumlah Anggaran sebesar Rp.533.704.000,00 sehingga masih ada tersisa sebesar Rp. 15.440.000 atau 2,89%
- Adapun rincian realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan per Kegiatan adalah sebagai berikut :
 1. Kegiatan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa, dari pagu anggaran sebesar Rp. 8.040.000,00 realisasi pencapaian kinerja Keuangan sampai Desember adalah sebesar Rp. 7.959.000,00 atau 98,99% dengan sisa anggaran sebesar Rp 81.000. – atau % dari anggaran Kegiatan ini terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan yaitu :
 - a. Sub kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa dari Pagu anggaran sebesar Rp. 6.240.000,00 realisasi pencapaian Kinerja Keuangan sampai dengan bulan Desember adalah sebesar Rp. 6.159.00,00 atau 98,70%
 - b. Sub kegiatan peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan, Pagu Anggarannya sebesar Rp. 1.800.000,00 realisasi pencapaian Kinerja Keuangan sampai dengan bulan Desember adalah sebesar Rp. 1.800.000,00 atau 100% .
 2. Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintah Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah.

Pada Kegiatan penyelenggaraan pemerintah umum sesuai penugasan kepala daerah, pagu anggaran sebesar Rp.135.737.000,00 realisasi pencapaian kinerja Keuangan sampai dengan bulan Desember adalah sebesar

Rp.133.897.000,00 atau 98,64% dengan sisa anggaran sebesar Rp. 1.840.000,00 atau 1,36% Kegiatan ini terdiri dari 2 (dua) Sub Kegiatan yaitu :

- a. Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengalaman Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Republik Indonesia, Pagu Anggaran sebesar Rp. 75.907.000,00 realisasi pencapaian kinerja Keuangan sampai dengan bulan Desember sebesar Rp. 75.907.000,00 atau 100% sisa anggaran sebesar Rp. -,00 atau 0%.
- b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan, Pagu Anggaran sebesar Rp.59.830.000,00 realisasi pencapaian kinerja Keuangan sampai dengan bulan Desember sebesar Rp. 57.990.000,00 atau 96,92%. sisa anggaran sebesar Rp. 1.840.000,00 atau 3,08%.

3. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

Pada Kegiatan pemberdayaan di kelurahan pagu anggaran sebesar Rp. 2.856.794.093,00 realisasi pencapaian Kinerja Keuangan sampai bulan Desember adalah sebesar Rp. 2.815.371.983,00 atau 98,55% sisa anggaran sebesar Rp. 41.422,110,00 atau 1,45%. Kegiatan ini terdiri dari 2 Sub Kegiatan yaitu :

- a. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan, Pagu Anggaran sebesar Rp. 800.000.000,00 realisasi pencapaian Kinerja Keuangan sampai bulan Desember adalah sebesar Rp. 800.000.000,00 atau 100% sisa Anggaran sebesar Rp. -,00 atau 0%.
- b. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, Pagu Anggaran sebesar Rp. 2.056.794.093,00 realisasi pencapaian Kinerja Keuangan sampai bulan Desember adalah sebesar Rp. 2.015.371.983,00 atau 97,99% sisa anggaran sebesar Rp. 41.422.110,00 atau 2,01%.

4. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Pagu Anggaran sebesar Rp. 6.056.038.306,00 realisasi pencapaian Kinerja Keuangan sampai bulan Desember adalah sebesar Rp. 6.011.184.120,00 atau 99,26% sisa anggaran sebesar Rp. 44.854.186,00 atau 0,74% Kegiatan ini terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan yaitu :

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Pagu Anggaran sebesar Rp. 6.055.446.306,00 realisasi pencapaian Kinerja keuangan sampai bulan Desember adalah sebesar Rp. 6.010.592.120,00 atau 99,26% dari anggaran yang disediakan. sisa pagu anggaran sebesar Rp.44.854.186,00 atau 0,74%
- b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD, Pagu Anggaran sebesar Rp. 592.000,00 realisasi pencapaian Kinerja Keuangan sampai bulan Desember adalah sebesar 592.000,00 atau 100%

5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Pada Kegiatan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah pagu anggaran sebesar Rp. 359.769.750,00 realisasi pencapaian Kinerja Keuangan sampai bulan Desember adalah sebesar Rp. 319.384.547,00 atau 88,77% sisa pagu anggaran sebesar Rp. 40.385.203,00 atau 11,23%

Kegiatan ini terdiri dari 5 (lima) sub kegiatan yaitu :

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Pagu Anggaran sebesar Rp. 7.293.000,00 realisasi pencapaian Kinerja Keuangan sampai bulan Desember adalah sebesar Rp.5.195.189,00 atau ,71,24% sisa pagu anggaran sebesar Rp.2.097.811,00 atau 28,76%
- b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor Inst, Pagu Anggaran sebesar Rp. 22.500.000,00 realisasi pencapaian Kinerja Keuangan sampai bulan Desember adalah sebesar Rp. 21.524.000,00 atau ,95,66% sisa pagu anggaran sebesar Rp. 976.000,00 atau 28,76%
- c. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Pagu Anggaran sebesar Rp. 256.093.000,00 realisasi pencapaian Kinerja Keuangan sampai bulan Desember adalah sebesar Rp. 251.630.369,00 atau 98,26% sisa Pagu Anggaran sebesar Rp. 4.462.631,00 atau 1,74%.
- d. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan, Pagu Anggaran sebesar Rp. 12.043.750,00 realisasi pencapaian Kinerja Keuangan sampai bulan desember adalah sebesar Rp. 11.783.389,00 atau 97,84% sisa Pagu Anggaran sebesar Rp. 260.361,00 atau 2,16%
- e. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, Pagu Anggaran adalah sebesar Rp. 61.840.000,00 realisasi pencapaian kinerja keuangan sampai bulan desember adalah Rp. 29.251.600,00 atau 47,30% sisa Pagu Anggaran sebesar Rp. 32.588.400,00 atau 52,7%

6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Pagu Anggaran Rp. 72.000.000,00 realisasi pencapaian Kinerja Keuangan sampai bulan desember adalah sebesar Rp.72.000.000,00 atau 100%

Kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan yaitu :

- a. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Pagu Anggaran Rp. 72.000.000,00 realisasi pencapaian Kinerja Keuangan sampai bulan desember adalah sebesar Rp.72.000.000,00 atau 100%

7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah, Pagu Anggaran sebesar Rp. 562.928.800,00 realisasi pencapaian Kinerja Keuangan sampai bulan desember adalah sebesar Rp. 444.949.821,00 atau 79,04% sisa Pagu Anggaran sebesar Rp. 117.978.979,00 atau 20,96% Kegiatan ini terdiri dari 3 (tiga) Sub Kegiatan yaitu :

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Pagu Anggaran sebesar Rp. 1.950.000,00 realisasi pencapaian Kinerja Keuangan sampai bulan Desember adalah sebesar Rp. 1.950.000,00 atau 100%
- b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik, Pagu Anggaran sebesar Rp. 160.378.800,00 realisasi pencapaian Kinerja Keuangan adalah sebesar Rp. 123.399.821,00 atau 76,94% sisa Pagu Anggaran sebesar Rp. 36.978.979,00 atau 23,06%
- c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, Pagu Anggaran sebesar Rp. 400.600.000,00 realisasi pencapaian kinerja keuangan adalah sebesar Rp. 319.600.000,00 atau 79,78,00% sisa Pagu Anggaran sebesar Rp. 81.000.000,00 atau 20,22%

8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Pagu Anggaran sebesar Rp. 157.755.600,00 realisasi pencapaian Kinerja Keuangan sampai bulan Desember adalah sebesar Rp.152.557.731,00 atau 96,71% sisa Pagu Anggaran sebesar Rp. 5.197.869,00 atau 3,29%

Kegiatan ini terdiri dari 4 (empat) Sub Kegiatan yaitu :

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pagu Anggaran sebesar Rp. 134.331.500,00 realisasi pencapaian Kinerja Keuangan sampai bulan Desember adalah sebesar Rp. 130.268.132,00 atau 96,98% sisa Pagu Anggaran sebesar Rp. 4.063.368,00 atau 3,02%
 - b. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Pagu Anggaran Rp. 12.450.000,00 realisasi pencapaian kinerja keuangan sampai bulan Desember adalah sebesar Rp. 12.143.200,00 atau 97,54% sisa Pagu Anggaran sebesar Rp. 306.800,00 atau 2,46%.
 - c. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, Pagu Anggaran Rp. 4.024.100,00 realisasi pencapaian kinerja keuangan sampai bulan Desember sebesar Rp. 3.862.689,00 atau 95,99% sisa Pagu Anggaran sebesar Rp. 161.411,00 atau 4,01%.
 - d. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, Pagu Anggaran Rp. 6.950.000,00 realisasi pencapaian kinerja keuangan sampai bulan Desember sebesar Rp. 6.283.710,00 atau 90,41% sisa Pagu Anggaran sebesar Rp. 666.290,00 atau 9,59%.
9. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah,
- Pada Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Pagu Anggaran Sebesar Rp. 24.150.000,00 realisasi pencapaian kinerja keuangan sampai bulan Desember sebesar Rp. 23.442.660,00 atau 97,07% sisa Pagu Anggaran sebesar Rp. 707.340 atau 2,93%.
- Kegiatan ini Terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan yaitu :
- a. Sub. Kegiatan Pengadaan Pakain Dinas beserta Atribut Kelengkapannya, Pagu Anggaran Sebesar Rp. 24.150.000,00 realisasi pencapaian kinerja keuangan sampai bulan Desember sebesar Rp. 23.442.660,00 atau 97,07 % sisa Pagu Anggaran sebesar Rp.707.340 atau 2.93%.

3.2 Rincian Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan OPD

Rincian Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan OPD Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Ikhtisar Pencapaian Kinerja APBD SKPD OPD Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2025

NO	PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET/SASARAN		KEUANGAN/BELANJA			SISA ANGGARAN	
				RENCANA	REALISA SI (%)	RENCANA	REALISASI			
						(Rp.)	(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
	BELANJA DAERAH					10.234.808.849,-	9.982.342.023,-	97,53	252.466.826,-	2,47
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					7.232.642.456,-	7.023.518.879,-	97,11	209.123.577,-	2,89
	1.	Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Daerah	Prosentase Tercapainya Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Daerah	7 Sub Kegiatan	100 %	0,00-	0,00,-	0	0,-	0
	a.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Prosentase Terpenuhi Penyusunan Renstra Dan Renja Perangkat Daerah	0 Dokumen	100 %	0,00,-	0,00,-	0	0,-	0
	b.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	0 Dokumen	100 %	0,00,-	0,00,-	0	0,-	0
	c.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	0 Dokumen	100 %	0,00,-	0,00,-	0	0,-	0
	d.	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	0 Dokumen	100 %	0,00,-	0,00,-	0	0,-	0
	e.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	0 Dokumen	100 %	0,00,-	0,00,-	0	0,-	0
	f.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyesunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	0 Laporan	100 %	0,00,-	0,00,-	0	0,-	0
	g.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Tersusunnya Dokumen Evaluasi Perencanaan Dan Realisasi	0 Dokumen	0	0,00,-	0,00,-	0	0,-	0

			Anggaran							
	2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	5 Sub Kegiatan	100 %	6.056.038.306,-	6.011.184.120,-	99,26	44.854.186,-	0,74
	a.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji Dan Tunjangan ASN	12 Bulan	100 %	6.055.446.306,-	6.010.592.120,-	99,26	44.854.186,-	0,74
	b.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	0 Laporan	0	0,00	00,0	0	0,-	0
	c.	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Tersusunnya Dokumen LRA, BKU, Buku Pajak, SPJ Fungsional Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran Yang Tersusun Di Kecamatan Negara	0 Dokumen	0	0,00,-	0,00,-	0	0,-	0
	d.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	0 Laporan	0	0,00,-	0,00,-	0	0,-	0
	e.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	0 bulan	100 %	592.000,00,-	592.000,00,-	100	0,-	0
	3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	1 Sub	100 %	0,00,-	0,00,-	0	0,-	0
	a.	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah SKPD	0 laporan	100 %	0,00,-	0,00,-	0	0,-	0
	4.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pemenuhan sarana dan prasarana perangkat daerah	1 Sub	100 %	24.150.000,00,-	23.442.660,00,-	97,07	707.340,00,-	2,93
	a.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	0 Jenis	100 %	24.150.000,00,-	24.150.000,00,-	97,07	707.340,-	2,93

	5. Administrasi Umum Perangkat Daerah		Prosentase Terpenuhi Adminstrasi Umum Perangkat Daerah	7 Sub Kegiatan	100 %	359.769.750,-	319.384.547,-	88,77	40.385.203,-	11,23
	a.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhi Penerangan Gedung Kantor Yang Diadakan	26Paket	100 %	7.293.000,-	5.195.189,-	71,24	2.097.811,-	28,76
	b.	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhi Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Pada Kantor Camat Dan Kelurahan	3 Unit	100 %	22.500.000,00,-	21.524.000,00,-	95,66	976.000,00,-	4,34
	c.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terpenuhi Alat Tulis Kantor, Upakara Banten, Makanan Dan Minuman Rapat	35 Paket	100 %	256.093.000,-	251.630.369,-	98,26	4.462.631,-	1,74
	d.	Penyediaan Barang Cetak Dan Penggandaan	Terpenuhi Barang Cetak Dan Penggandaan Yang Diadakan	8 Jenis	100 %	12.043.750,-	11.783.389,-	97,84	260.361,-	2,16
	e.	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Terpenuhi Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	0 Bulan	100 %	0,00-	0,00,-	0	0,00,-	0
	f.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	0 bulan	100 %	0,00-	0,00-	0	0,00-	0
	g.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Terpenuhi Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	92 Laporan	100 %	61.840.000,-	29.251.600,-	47,30	32.588.400,-	52,07
	6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Terpenuhi barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah pada perangkat daerah	1 Sub	100 %	72.000.000,-	72.000.000,-	100	-	-
	a.	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	1 Unit	100 %	72.000.000,-	72.000.000,-	100	-	-
	7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Prosentase Terpenuhi Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Sub Kegiatan	100 %	562.928.800,-	444.949.821,-	79,04	117.978.979,-	20,96
	a.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhi Materai Yang Diadakan	100 Lembar	100 %	1.950.000,-	1.950.000,-	100	-	-
	b.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhi Pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Dan Listrik	12 Bulan	100 %	160.378.800,-	123.399.821,-	76,94	36.978.979,-	23,06

	c.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Tenaga Kontrak Untuk Mendukung Efektifitas Kegiatan Pemerintahan	248 OB	100 %	400.000.000,-	319.600.000,-	79,78	81.000.000,-	20,22-
	8.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Terpenuhiya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4 Sub Kegiatan	100 %	157.755.600,-	152.557.731,-	96,71	5.197.869,-	3,29
	a.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpenuhiya Pemeliharaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Diadakan	34 Unit	100 %	134.331.500,-	130.268.132,-	96,98	4.063.368,-	3,02
	b.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpenuhiya Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya Yang Diadakan	31 Unit	100%	12.450.000,-	12.143.200,-	97,54	306.800,-	2,46
	c.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpenuhiya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	25 Jenis	100 %	4.024.100,00,-	3.862.689,00,-	95,99-	161.411-	4,01-
	d.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpenuhiya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	7 Unit	100 %	6.950.000,-	6.283.710,-	90,41	666.290,-	9,59
II.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					2.864.834.093,-	2.823.330.983,-	98,55	41.503.110,-	1,45
	1.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Prosentase Terpenuhiya Kegiatan Kecamatan Dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	2 Sub Kegiatan	100 %	8.040.000,-	7.959.000,-	98,99	81.000-	1,01
	a.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Prosentase Terlaksananya Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	1 Kali	100 %	6.240.000-	6.159.000,-	98,70	81.000-	1,3
	b.	Peningkatan Efiktifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Prosentase Terpenuhiya Kegiatan Lomba-Lomba	1 Kegiatan	100 %	1.800.000,-	1.800.000,-	100	-	-
	2.	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	Prosentase Terpenuhiya Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	2 Sub Kegiatan	100 %	2.856.794.093,-	2.815.371.983,-	98,55	41.422.110,-	1,45

	a.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Prosentase Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan	4 Paket	100 %	800.000.000,-	800.000.000,-	100	,-	-
	b.	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Prosentase Terpenuhi Desa Pakraman, Banjar Pakraman Dan Tempek Yang Diberdayakan	4 Jenis	100 %	2.056.794.093,-	2.015.371.983,-	97,99	41.422.110,-	2,01
III.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					0,00,-	0,00,-	-	0,00,-	-
	1.	Koordinasi Penerapan Dan Penengakan Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah	Prosentase Terlaksananya Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan	1 Sub Kegiatan	100 %	0,00,-	0,00,-	-	0,00,-	-
	a.	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya dibidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Inadonesia	Prosentase Terlaksananya Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan	0 Laporan	100 %	0,00,-	0,00,-	-	0,00,-	-
IV.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					135.737.000,-	133.897.000,-	98,64	1.840.000,-	1,36
	1.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Prosentase Terlaksananya Lomba-Lomba Untuk Hari-Hari Nasional	2 Sub Kegiatan	100 %	135.737.000,-	133.897.000,-	98,64	1.840.000,-	1,36
	a.	Pembinaan Wawasan Kebangsaan Dan Ketahanan Nasional Dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia	Prosentase Kegiatan Harnas Yang Dilaksanakan	7 Kegiatan	100 %	75.907.000,-	75.907.000,-	100	-	-
	b.	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah dokumen tugas forum koordinasi pimpinan di Kecamatan	1 kegiatan	100 %	59.830.000,-	57.990.000,-	96,92	1.840.000	3,08
V.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					1.595.300,00,-	1.595.161,00,-	99,99	139	0,01
	1.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan	Jumlah Apbdes Yang Tersusun Sesuai Dengan Regular Keuangan Desa	1 Sub Kegiatan	100 %	1.595.300,00,-	1.595.161,00,-	99,99	139,-	0,01

	Pengawasan Pemerintahan Desa		(Apdbdes) Yang Dilaksanakan							
	a.	Fasilitasi, Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Prosentase Terpenuhi Pembinaan Dan Evaluasi Apbdes Yang Dilaksanakan	8 Desa	100%	1.595.300,00,-	1.595.161,00,-	99,99	139,-	0,01
	TOTAL					10.234.808.849,-	9.982.342.023,-	97,53	252.466.826,-	2,47

3.3 Hambatan Dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Kinerja

Hambatan dan kendala yang ada dalam pelaksanaan pencapaian target kinerja program dan kegiatan Pemerintah Kecamatan Jembrana didasari pada penyerapan anggaran dibawah 85%, adapun hambatan/kendala dalam pelaksanaan pencapaian target terjadi pada program dan kegiatan sebagai berikut :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah pada Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dari pagu Rp.7.293.000,00 sampai dengan bulan Desember terealisasi sebesar Rp.5.195.189,00 atau 71,24% dengan sisa anggaran sebesar Rp. 2.097.203,00 atau 28,76%.

Hambatan : Proses Pengadaan Barang dan Jasa pada Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor mendapat Pengurangan Harga dikarenakan adanya Negosiasi dengan Rekanan.

2. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dari pagu anggaran Rp.61.840.000,00 sampai dengan bulan Desember terealisasi sebesar Rp.29.251.600,00 atau 47,30% dengan sisa anggaran sebesar Rp. 32.588.400,00 atau 52,70%.

Hambatan :

- *Rapat koordinasi luar daerah luar provinsi menggunakan Trasportasi jalur darat tidak menggunakan jalur udara sehingga terjadi Efisiensi penggunaan anggaran.*
- *Penggunaan Penginapan Hotel disesuaikan harga di Perbub No.14 Tahun 2022 dan beberapa Biaya Penginapan dipakai 30% sehingga terjadi Efisiensi penggunaan anggaran.*

3. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Sub Kegiatan Penyediaan, Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dari pagu anggaran Rp. 160.378.800,00 sampai dengan bulan Desember terealisasi sebesar Rp. 123.399.821,00 atau 76,94% dengan sisa anggaran sebesar Rp. 36.978.979,00 atau 23,06%.

Hambatan : Belanja yang sedianya dipergunakan untuk belanja listrik dan Air akibat realisasi tagihan riil yang tidak dapat diprediksi, sehingga terjadi efisiensi penggunaan anggaran.

4. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Sub Kegiatan Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor, dari pagu anggaran Rp. 400.600.000,00 sampai dengan bulan Desember terealisasi sebesar Rp. 319.600.000,00 atau 79,78% dengan sisa anggaran sebesar Rp. 81.000.000,00 atau 20,22%.

Hambatan :

Realisasi Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor pada Jasa Tenaga Kontak terjadi perubahan dikarenakan Pelantikan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang anggarannya sudah dianggarkan di BKSDM, sehingga terjadi sisa anggaran sebesar Rp. 81.000.000,00.

BAB IV

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN DAERAH

4.1 Rincian Dari Penjelasan Masing-Masing Pos-Pos Pelaporan Keuangan OPD Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana

1. Pendapatan

Di dalam APBD Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2025 untuk OPD Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana tidak ditargetkan adanya Pendapatan Daerah, sehingga Tahun Anggaran 2025 Realisasi Pendapatan Daerah adalah Rp. 0,- (nihil).

2. Belanja

Realisasi Belanja Daerah tahun anggaran 2025 adalah sebesar Rp. 9.982.342.023,00 dari anggaran yang disediakan dalam APBD sebesar Rp. 10.234.808.849,00. Dengan demikian realisasi anggaran Belanja Daerah mencapai 97,53% yang berarti sisa anggaran masih lebih kecil sebesar Rp. 252.466.826,00 atau 2,47% dari anggaran yang disediakan dalam APBD.

Belanja terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal yang realisasinya dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Belanja Operasional

Realisasi Anggaran Belanja Operasional tahun anggaran 2025 mencapai Rp. 9.464.078.023,00 atau 97,56% yang berarti lebih besar sebesar Rp. 237.466.826,00 atau 2,44% dari jumlah anggaran yang telah disediakan sebesar Rp. 9.701.104.849,00

Rincian realisasi Anggaran Belanja Operasi adalah sebagai berikut:

1) Belanja Pegawai

Realisasinya tahun anggaran 2025 mencapai sebesar Rp. 6.010.592.120,00 atau 99,26%, yang berarti sisa dari pagu anggaran sebesar Rp. 44.854.186,00 atau 0,74% dari jumlah anggaran yang disediakan sebesar Rp. 6.055.446.306,00

Tabel 1, Dengan Uraian Belanja Pegawai, sebagai berikut :

URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025
1	2	3	4
BELANJA PEGAWAI	6.055.446.306,00	6.010.592.120,00	99,26
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	3.164.986.000,00	3.144.290.176,00	99,35
Belanja Gaji Pokok ASN	2.264.366.000,00	2.251.819.900,00	99,45
Belanja Gaji Pokok PNS	2.264.366.000,00	2.251.819.900,00	99,45
Belanja Tunjangan Keluarga ASN	213.820.000,00	212.128.198,00	99,21
Belanja Tunjangan Keluarga PNS	213.820.000,00	212.128.198,00	99,21
Belanja Tunjangan Jabatan ASN	204.972.000,00	203.110.000,00	99,09
Belanja Tunjangan Jabatan PNS	204.972.000,00	203.110.000,00	99,09
Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	33.688.000,00	33.390.000,00	99,12
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	33.688.000,00	33.390.000,00	99,12
Belanja Tunjangan Beras ASN	113.880.000,00	112.540.680,00	98,82
Belanja Tunjangan Beras PNS	113.880.000,00	112.540.680,00	98,82
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	127.764.000,00	127.194.325,00	99,55
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	127.764.000,00	127.194.325,00	99,55
Belanja Pembulatan Gaji ASN	28.000,00	27.110,00	96,82
Belanja Pembulatan Gaji PNS	28.000,00	27.110,00	96,82
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	187.800.000,00	185.532.815,00	98,79
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	187.800.000,00	185.532.815,00	98,79
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	4.667.000,00	4.636.767,00	99,35
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	4.667.000,00	4.636.767,00	99,35
Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	14.001.000,00	13.910.381,00	99,35
Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	14.001.000,00	13.910.381,00	99,35
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2.890.460.306,00	2.866.301.944,00	99,16
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	2.035.154.096,00	2.013.249.137,00	98,92
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	2.035.154.096,00	2.013.249.137,00	98,92
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	254.760.024,00	252.569.487,00	99,14
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	254.760.024,00	252.569.487,00	99,14
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	600.546.186,00	600.483.320,00	99,99
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	600.546.186,00	600.483.320,00	99,99

JUMLAH BELANJA PEGAWAI	6.055.446.306,00	6.010.592.120,00	99,26
-------------------------------	-------------------------	------------------	-------

2) Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa realisasinya tahun anggaran 2025 mencapai Rp.3.453.485.903,00 atau 94,73 % yang berarti sisa dari pagu sebesar Rp. 192.172.640,00 atau 5,27% dari jumlah anggaran yang disediakan sebesar Rp. 3.645.658.543,00

Tabel 2, Dengan Uraian Belanja Barang dan Jasa, sebagai berikut :

URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025
1	2	3	4
BELANJA BARANG DAN JASA	3.645.658.543,00	3.453.485.903,00	94,73
Belanja Barang	861.146.671,00	840.354.595,00	97,59
Belanja Barang Pakai Habis	861.146.671,00	840.354.595,00	97,59
Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	26.735.071,00	23.922.993,00	89,48
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	131.210.500,00	130.174.879,00	99,21
Belanja Bahan-Bahan Baku	35.920.000,00	35.919.574,00	100,00
Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	31.993.000,00	27.852.395,00	87,06
Belanja Bahan-Bahan Lainnya	8.128.000,00	7.655.750,00	94,19
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	10.000.000,00	9.915.630,00	99,16
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	10.628.700,00	10.058.351,00	94,63
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	32.196.700,00	29.060.622,00	90,26
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	20.268.600,00	19.812.022,00	97,75
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.950.000,00	1.950.000,00	100,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	15.993.000,00	15.009.959,00	93,85
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	7.293.000,00	5.195.189,00	71,24
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	273.670.600,00	272.907.989,00	99,72
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	81.784.000,00	79.731.460,00	97,49
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	6.147.500,00	6.147.500,00	100,00
Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	57.000.000,00	56.999.983,00	100,00
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	81.178.000,00	79.837.639,00	98,35
Belanja Pakaian Olahraga	29.050.000,00	28.202.660,00	97,08
Belanja Jasa	1.907.215.872,00	1.779.289.093,00	93,29

Belanja Jasa Kantor	1.830.415.872,00	1.702.569.093,00	93,02
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	0,00	0,00	0,00
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	54.630.000,00	54.630.000,00	100,00
Honorarium Rohaniwan	237.600.000,00	231.300.000,00	97,35
Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00
Belanja Jasa Tenaga Administrasi	270.000.000,00	189.000.000,00	70,00
Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	889.293.072,00	889.293.072,00	100,00
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	111.600.000,00	111.600.000,00	100,00
Belanja Jasa Tenaga Keamanan	0,00	0,00	0,00
Belanja Jasa Pengolahan Sampah	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00
Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
Belanja Tagihan Telepon	40.080.000,00	27.194.742,00	67,85
Belanja Tagihan Air	30.900.000,00	16.761.750,00	54,25
Belanja Tagihan Listrik	44.398.800,00	38.960.129,00	87,75
Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	0,00	0,00	0,00
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	45.000.000,00	40.483.200,00	89,96
Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	9.714.000,00	6.146.200,00	63,27
Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan operator layanan operasional	27.000.000,00	27.000.000,00	100,00
Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan pengelola layanan operasional	4.500.000,00	4.500.000,00	100,00
Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan penata layanan operasional	4.500.000,00	4.500.000,00	100,00
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	76.800.000,00	76.720.000,00	99,90
Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	72.000.000,00	72.000.000,00	100,00
Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	4.800.000,00	4.720.000,00	98,33
Belanja Pemeliharaan	523.246.000,00	521.840.615,00	99,73
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	30.450.000,00	29.044.615,00	95,38
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	2.500.000,00	2.349.870,00	93,99
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	6.550.000,00	6.375.285,00	97,33
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	2.000.000,00	1.892.550,00	94,63
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	450.000,00	0,00	0,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	5.500.000,00	5.295.810,00	96,29

Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.000.000,00	987.900,00	98,79
Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	5.950.000,00	5.771.500,00	97,00
Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	6.500.000,00	6.371.700,00	98,03
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	492.796.000,00	492.796.000,00	100,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	492.796.000,00	492.796.000,00	100,00
Belanja Perjalanan Dinas	121.800.000,00	79.751.600,00	65,48
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	121.800.000,00	79.751.600,00	65,48
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	121.800.000,00	79.751.600,00	65,48
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	232.250.000,00	232.250.000,00	100,00
Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	3.250.000,00	3.250.000,00	100,00
Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	3.250.000,00	3.250.000,00	100,00
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	229.000.000,00	229.000.000,00	100,00
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	229.000.000,00	229.000.000,00	100,00
JUMLAH BELANJA BARANG DAN JASA	3.645.658.543,00	3.453.485.903,00	94,73

3. Belanja Modal

Belanja Modal tahun anggaran 2025 realisasinya mencapai Rp.518.264.000,00 atau 97,11 % yang berarti sisa dari pagu sebesar Rp. 15.440.000,00 atau 2,89 % dari anggaran yang telah disediakan sebesar Rp. 533.704.000,00

Tabel 3, Dengan Uraian Belanja Modal, sebagai berikut :

URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025
1	2	3	4
BELANJA MODAL	533.704.000,00	518.264.000,00	97,11
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	226.500.000,00	211.060.000,00	93,18
Belanja Modal Alat Angkutan	184.000.000,00	170.000.000,00	92,39
Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	184.000.000,00	170.000.000,00	92,39
Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	184.000.000,00	170.000.000,00	92,39
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	20.000.000,00	19.536.000,00	97,68
Belanja Modal Alat Kantor	20.000.000,00	19.536.000,00	97,68
Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	20.000.000,00	19.536.000,00	97,68

Belanja Modal Komputer	22.500.000,00	21.524.000,00	95,66
Belanja Modal Komputer Unit	19.500.000,00	18.527.000,00	95,01
Belanja Modal Personal Computer	19.500.000,00	18.527.000,00	95,01
Belanja Modal Peralatan Komputer	3.000.000,00	2.997.000,00	99,90
Belanja Modal Peralatan Personal Computer	3.000.000,00	2.997.000,00	99,90
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	307.204.000,00	307.204.000,00	100,00
Belanja Modal Jalan dan Jembatan	254.215.550,00	254.215.550,00	100,00
Belanja Modal Jalan	254.215.550,00	254.215.550,00	100,00
Belanja Modal Jalan Desa	254.215.550,00	254.215.550,00	100,00
Belanja Modal Bangunan Air	52.988.450,00	52.988.450,00	100,00
Belanja Modal Bangunan Air Kotor	52.988.450,00	52.988.450,00	100,00
Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Kotor	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor	52.988.450,00	52.988.450,00	100,00
JUMLAH BELANJA MODAL	533.704.000,00	518.264.000,00	97,11

Rasio-Rasio Belanja

- Rasio belanja operasional terhadap total belanja adalah sebesar 94,73%;
- Rasio belanja modal terhadap total belanja adalah sebesar 97,11%
- Rasio belanja pegawai terhadap total belanja adalah sebesar 99,26%;

Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2025 dengan Periode Sebelumnya (Tahun 2024) dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4. Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2025 dan 2024

URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5
BELANJA DAERAH	10.234.808.849,00	9.982.342.023,00	97,53	9.697.640.872,00
BELANJA OPERASI	9.701.104.849,00	9.464.078.023,00	97,56	8.921.325.872,00
Belanja Pegawai	6.055.446.306,00	6.010.592.120,00	99,26	6.056.670.360,00
Belanja Barang dan Jasa	3.645.658.543,00	3.453.485.903,00	94,73	2.864.655.512,00
BELANJA MODAL	533.704.000,00	518.264.000,00	97,11	776.315.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	307.204.000,00	307.204.000,00	100,00	776.315.000,00
JUMLAH BELANJA	10.234.808.849,00	9.982.342.023,00	97,53	9.697.640.872,00

Anggaran dan realisasi belanja tahun 2025 lebih besar dari pada realisasi tahun 2024, hal ini disebabkan karena menyesuaikan Anggaran yang tersedia yang dianggarkan Tahun Anggaran 2025 pada Kecamatan Negara. Sementara itu persentase realisasi belanja tahun anggaran 2025 malah lebih besar jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2024 dikarenakan dalam pelaksanaannya lebih dimaksimalkan agar yang keterbatasan anggaran yang disediakan dimanfaatkan secara tepat.

Perincian Anggaran dan Realisasi Belanja OPD Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana tahun anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 5. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2025 pada Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana

URAIAN	ANGGARAN INDUK 2025	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 2025	REALISASI 2025	% 2025
1	2	3	4	5
BELANJA DAERAH	10.066.621.265,00	10.234.808.849,00	9.982.342.023,00	97,53
BELANJA OPERASI	9.699.417.265,00	9.701.104.849,00	9.464.078.023,00	97,56
Belanja Pegawai	6.171.033.593,00	6.055.446.306,00	6.010.592.120,00	99,26
Belanja Barang dan Jasa	3.528.383.672,00	3.645.658.543,00	3.453.485.903,00	94,73
BELANJA MODAL	367.204.000,00	533.704.000,00	518.264.000,00	97,11
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	60.000.000,00	226.500.000,00	211.060.000,00	93,18
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	307.204.000,00	307.204.000,00	307.204.000,00	100,00
JUMLAH BELANJA DAERAH	10.066.621.265,00	10.234.808.849,00	9.982.342.023,00	97,53

Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2025 cukup besar, hal ini disebabkan anggaran gaji dan tunjangan ASN yang diadakan disesuaikan dengan kebutuhan Pegawai ASN pada tahun 2025 dianggarkan pada Kecamatan

Negara yaitu Kenaikan Tambahan Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN pada Tunjangan TPP Gaji ke-13 dan TPP Gaji ke-14 dibayarkan penuh 100% sesuai dengan golongan ASN. Perubahan Anggaran Tahun Anggaran 2025 beberapa Belanja mengalami penurunan dari Anggaran Induk Tahun Anggaran 2025 dikarenakan menyesuaikan anggaran yang tersedia pada APBD Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2025, sesuai dengan Tabel diatas.

Rincian realisasi belanja per jenis belanja pada Kecamatan Negara dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 6. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja OPD Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2025

Uraian	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Belanja (Rp)	Persentase
1	2	3	4=(3/2)x100%
Belanja Daerah	10.234.808.849,00	9.982.342.023,00	97,53
Belanja Operasi	9.701.104.849,00	9.464.078.023,00	97,56
Belanja Modal	533.704.000,00	518.264.000,00	97,11

Tabel 7. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per Jenis Belanja OPD Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2025

Kode Rek	Uraian Jenis Belanja	Pagu Anggaran	Realisasi Belanja	Persentase
1	2	3	4	5=(4/3) x 100%
5.1	Belanja Operasi	9.701.104.849,00	9.464.078.023,00	97,56
5.1.01	Belanja Pegawai	6.055.446.306,00	6.010.592.120,00	99,26
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.645.658.543,00	3.453.485.903,00	94,73
5.2	Belanja Modal	533.704.000,00	518.264.000,00	97,11

Pembiayaan

Di dalam APBD Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2025 untuk OPD Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana tidak ditargetkan adanya Pembiayaan baik Penerimaan Pembiayaan Daerah maupun Pengeluaran

Pembiayaan Daerah, sehingga Tahun Anggaran 2025 Realisasi Pembiayaan adalah Rp. 0,- (nihil).

4.2 Pos-Pos Laporan Operasional

Laporan Operasional umumnya menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar secara komparatif. Tujuan laporan operasional adalah memberikan informasi tentang kegiatan operasional keuangan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit-LO dari suatu entitas pelaporan.

Kecamatan Negara bukan instansi pengelola pendapatan daerah sehingga laporan operasional tidak menyajikan unsur pendapatan, hanya menyajikan unsur beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit sebelum pos luar biasa dan dan surplus/defisit-LO. Penjabaran dari Beban Pegawai – LO dan Beban Barang dan Jasa dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 8. Laporan Operasional OPD Kecamatan Negara Tahun Anggaran 2025

Kode Rekening	Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
KEGIATAN OPERASIONAL					
8	BEBAN	10.603.896.233,00	10.335.308.920,00	268.587.313,00	2,60
8.1	BEBAN OPERASI	9.115.749.816,00	8.925.709.698,00	190.040.118,00	2,13
8.1.01	Beban Pegawai	6.006.048.224,00	6.061.214.256,00	(55.166.032,00)	(0,91)
8.1.01.01	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	3.139.746.280,00	3.151.808.343,00	(12.062.063,00)	(0,38)
8.1.01.01.01	Beban Gaji Pokok ASN	2.251.819.900,00	2.319.581.352,00	(67.761.452,00)	(2,92)
8.1.01.01.01.0001	Beban Gaji Pokok PNS	2.251.819.900,00	2.319.581.352,00	(67.761.452,00)	(2,92)
8.1.01.01.02	Beban Tunjangan Keluarga ASN	212.128.198,00	215.104.690,00	(2.976.492,00)	(1,38)
8.1.01.01.02.0001	Beban Tunjangan Keluarga PNS	212.128.198,00	215.104.690,00	(2.976.492,00)	(1,38)
8.1.01.01.03	Beban Tunjangan Jabatan ASN	203.110.000,00	211.150.000,00	(8.040.000,00)	(3,81)
8.1.01.01.03.0001	Beban Tunjangan Jabatan PNS	203.110.000,00	211.150.000,00	(8.040.000,00)	(3,81)
8.1.01.01.05	Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	33.390.000,00	34.480.000,00	(1.090.000,00)	(3,16)
8.1.01.01.05.0001	Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	33.390.000,00	34.480.000,00	(1.090.000,00)	(3,16)
8.1.01.01.06	Beban Tunjangan Beras	112.540.680,00	117.392.820,00	(4.852.140,00)	(4,13)

	ASN				
8.1.01.01.06.0001	Beban Tunjangan Beras PNS	112.540.680,00	117.392.820,00	(4.852.140,00)	(4,13)
8.1.01.01.07	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	122.650.429,00	46.189.742,00	76.460.687,00	165,54
8.1.01.01.07.0001	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	122.650.429,00	46.189.742,00	76.460.687,00	165,54
8.1.01.01.08	Beban Pembulatan Gaji ASN	27.110,00	30.980,00	(3.870,00)	(12,49)
8.1.01.01.08.0001	Beban Pembulatan Gaji PNS	27.110,00	30.980,00	(3.870,00)	(12,49)
8.1.01.01.09	Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	185.532.815,00	189.163.250,00	(3.630.435,00)	(1,92)
8.1.01.01.09.0001	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	185.532.815,00	189.163.250,00	(3.630.435,00)	(1,92)
8.1.01.01.10	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	4.636.767,00	4.678.868,00	(42.101,00)	(0,90)
8.1.01.01.10.0001	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	4.636.767,00	4.678.868,00	(42.101,00)	(0,90)
8.1.01.01.11	Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	13.910.381,00	14.036.641,00	(126.260,00)	(0,90)
8.1.01.01.11.0001	Beban Iuran Jaminan Kematian PNS	13.910.381,00	14.036.641,00	(126.260,00)	(0,90)
8.1.01.02	Beban Tambahan Penghasilan ASN	2.866.301.944,00	2.909.405.913,00	(43.103.969,00)	(1,48)
8.1.01.02.01	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	2.013.249.137,00	2.040.797.980,00	(27.548.843,00)	(1,35)
8.1.01.02.01.0001	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	2.013.249.137,00	2.040.797.980,00	(27.548.843,00)	(1,35)
8.1.01.02.03	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	252.569.487,00	256.075.366,00	(3.505.879,00)	(1,37)
8.1.01.02.03.0001	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	252.569.487,00	256.075.366,00	(3.505.879,00)	(1,37)
8.1.01.02.05	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	600.483.320,00	612.532.567,00	(12.049.247,00)	(1,97)
8.1.01.02.05.0001	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	600.483.320,00	612.532.567,00	(12.049.247,00)	(1,97)
8.1.02	Beban Barang dan Jasa	3.109.701.592,00	2.864.495.442,00	245.206.150,00	8,56
8.1.02.01	Beban Barang	840.401.897,00	672.945.253,00	167.456.644,00	24,88
8.1.02.01.01	Beban Barang Pakai Habis	840.401.897,00	672.945.253,00	167.456.644,00	24,88
8.1.02.01.01.0001	Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	23.922.993,00	0,00	23.922.993,00	100,00
8.1.02.01.01.0004	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	130.174.879,00	139.806.903,00	(9.632.024,00)	(6,89)
8.1.02.01.01.0005	Beban Bahan-Bahan Baku	35.919.574,00	33.920.000,00	1.999.574,00	5,89
8.1.02.01.01.0008	Beban Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	27.852.395,00	0,00	27.852.395,00	100,00
8.1.02.01.01.0012	Beban Bahan-Bahan Lainnya	7.655.750,00	0,00	7.655.750,00	100,00
8.1.02.01.01.0013	Beban Suku Cadang-Angkutan	9.915.630,00	10.000.000,00	(84.370,00)	(0,84)
8.1.02.01.01.0024	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	9.917.851,00	9.358.100,00	559.751,00	5,98

8.1.02.01.01.0025	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	29.078.424,00	21.179.400,00	7.899.024,00	37,30
8.1.02.01.01.0026	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	19.812.022,00	32.019.650,00	(12.207.628,00)	(38,13)
8.1.02.01.01.0027	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	2.250.000,00	4.560.000,00	(2.310.000,00)	(50,66)
8.1.02.01.01.0029	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	14.856.959,00	9.289.000,00	5.567.959,00	59,94
8.1.02.01.01.0031	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	5.195.189,00	19.191.200,00	(13.996.011,00)	(72,93)
8.1.02.01.01.0036	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	272.930.989,00	230.625.200,00	42.305.789,00	18,34
8.1.02.01.01.0052	Beban Makanan dan Minuman Rapat	79.731.460,00	53.926.000,00	25.805.460,00	47,85
8.1.02.01.01.0053	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	6.147.500,00	8.819.800,00	(2.672.300,00)	(30,30)
8.1.02.01.01.0056	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	56.999.983,00	57.000.000,00	(17,00)	(0,00)
8.1.02.01.01.0058	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	79.837.639,00	43.250.000,00	36.587.639,00	84,60
8.1.02.01.01.0076	Beban Pakaian Olahraga	28.202.660,00	0,00	28.202.660,00	100,00
8.1.02.02	Beban Jasa	1.778.457.480,00	1.956.130.797,00	(177.673.317,00)	(9,08)
8.1.02.02.01	Beban Jasa Kantor	1.701.737.480,00	1.877.460.797,00	(175.723.317,00)	(9,36)
8.1.02.02.01.0003	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	0,00	1.400.000,00	(1.400.000,00)	100,00
8.1.02.02.01.0004	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	54.630.000,00	76.000.000,00	(21.370.000,00)	(28,12)
8.1.02.02.01.0007	Beban Honorarium Rohaniwan	231.300.000,00	204.000.000,00	27.300.000,00	13,38
8.1.02.02.01.0025	Beban Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
8.1.02.02.01.0026	Beban Jasa Tenaga Administrasi	189.000.000,00	402.000.000,00	(213.000.000,00)	(52,99)
8.1.02.02.01.0028	Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum	889.293.072,00	849.207.000,00	40.086.072,00	4,72
8.1.02.02.01.0030	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	111.600.000,00	127.400.000,00	(15.800.000,00)	(12,40)
8.1.02.02.01.0031	Beban Jasa Tenaga Keamanan	0,00	18.000.000,00	(18.000.000,00)	100,00
8.1.02.02.01.0051	Beban Jasa Pengolahan Sampah	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	100,00
8.1.02.02.01.0055	Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	100,00
8.1.02.02.01.0059	Beban Tagihan Telepon	26.540.662,00	28.285.599,00	(1.744.937,00)	(6,17)
8.1.02.02.01.0060	Beban Tagihan Air	16.555.750,00	16.297.000,00	258.750,00	1,59
8.1.02.02.01.0061	Beban Tagihan Listrik	38.988.596,00	40.718.498,00	(1.729.902,00)	(4,25)
8.1.02.02.01.0062	Beban Langganan Jurnal/Surat	0,00	3.338.000,00	(3.338.000,00)	100,00

	Kabar/Majalah				
8.1.02.02.01.0063	Beban Kawat/Faksimili/Internet /TV Berlangganan	40.483.200,00	55.483.200,00	(15.000.000,00)	(27,04)
8.1.02.02.01.0067	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	6.146.200,00	5.331.500,00	814.700,00	15,28
8.1.02.02.01.0088	Beban jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan operator layanan operasional	27.000.000,00	0,00	27.000.000,00	100,00
8.1.02.02.01.0089	Beban jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan pengelola layanan operasional	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	100,00
8.1.02.02.01.0090	Beban jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan penata layanan operasional	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	100,00
8.1.02.02.04	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	76.720.000,00	78.670.000,00	(1.950.000,00)	(2,48)
8.1.02.02.04.0036	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	0,00
8.1.02.02.04.0117	Beban Sewa Alat Kantor Lainnya	4.720.000,00	6.670.000,00	(1.950.000,00)	(29,24)
8.1.02.03	Beban Pemeliharaan	178.840.615,00	34.525.000,00	144.315.615,00	418,00
8.1.02.03.02	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	29.044.615,00	34.525.000,00	(5.480.385,00)	(15,87)
8.1.02.03.02.0037	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	2.349.870,00	0,00	2.349.870,00	100,00
8.1.02.03.02.0038	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	6.375.285,00	10.450.000,00	(4.074.715,00)	(38,99)
8.1.02.03.02.0039	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	1.892.550,00	2.000.000,00	(107.450,00)	(5,37)
8.1.02.03.02.0121	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	5.295.810,00	8.335.000,00	(3.039.190,00)	(36,46)
8.1.02.03.02.0123	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	987.900,00	0,00	987.900,00	100,00
8.1.02.03.02.0405	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	5.771.500,00	9.345.000,00	(3.573.500,00)	(38,24)
8.1.02.03.02.0409	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan	6.371.700,00	4.395.000,00	1.976.700,00	44,98

	Personal Computer				
8.1.02.03.03	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	149.796.000,00	0,00	149.796.000,00	100,00
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	149.796.000,00	0,00	149.796.000,00	100,00
8.1.02.04	Beban Perjalanan Dinas	79.751.600,00	73.124.392,00	6.627.208,00	9,06
8.1.02.04.01	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	79.751.600,00	73.124.392,00	6.627.208,00	9,06
8.1.02.04.01.0001	Beban Perjalanan Dinas Biasa	79.751.600,00	73.124.392,00	6.627.208,00	9,06
8.1.02.05	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	232.250.000,00	127.770.000,00	104.480.000,00	81,77
8.1.02.05.01	Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	3.250.000,00	12.570.000,00	(9.320.000,00)	(74,14)
8.1.02.05.01.0001	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan	3.250.000,00	12.570.000,00	(9.320.000,00)	(74,14)
8.1.02.05.02	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	229.000.000,00	115.200.000,00	113.800.000,00	98,78
8.1.02.05.02.0001	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	229.000.000,00	115.200.000,00	113.800.000,00	98,78
	JUMLAH BEBAN OPERASI	9.115.749.816,00	8.925.709.698,00	190.040.118,00	2,13
08.01.08	Beban Penyusutan dan Amortisasi	1.488.146.417,00	1.409.599.222,00	78.547.195,00	5,57
8.1.08.01	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	187.676.499,00	201.333.708,00	(13.657.209,00)	(6,78)
8.1.08.01.02	Beban Penyusutan Alat Angkutan	50.559.831,00	34.369.355,00	16.190.476,00	47,11
8.1.08.01.02.0003	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	16.190.476,00	0,00	16.190.476,00	100,00
8.1.08.01.02.0005	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	34.369.355,00	34.369.355,00	0,00	0,00
8.1.08.01.03	Beban Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur	1.107.500,00	3.155.000,00	(2.047.500,00)	(64,90)
8.1.08.01.03.0024	Beban Penyusutan Alat Ukur-Alat Ukur Universal	1.107.500,00	3.155.000,00	(2.047.500,00)	(64,90)
8.1.08.01.05	Beban Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	79.049.153,00	88.295.265,00	(9.246.112,00)	(10,47)
8.1.08.01.05.0004	Beban Penyusutan Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	3.980.000,00	4.960.000,00	(980.000,00)	(19,76)
8.1.08.01.05.0005	Beban Penyusutan Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	43.074.201,00	43.397.400,00	(323.199,00)	(0,74)
8.1.08.01.05.0006	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Mebel	5.613.333,00	6.305.000,00	(691.667,00)	(10,97)

8.1.08.01.05.0008	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	1.960.001,00	6.311.665,00	(4.351.664,00)	(68,95)
8.1.08.01.05.0009	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	16.851.617,00	17.151.200,00	(299.583,00)	(1,75)
8.1.08.01.05.0011	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	7.070.001,00	9.570.000,00	(2.499.999,00)	(26,12)
8.1.08.01.05.0015	Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat	500.000,00	600.000,00	(100.000,00)	(16,67)
8.1.08.01.10	Beban Penyusutan Komputer	56.960.015,00	75.514.088,00	(18.554.073,00)	(24,57)
8.1.08.01.10.0002	Beban Penyusutan Komputer Unit-Personal Computer	37.980.270,00	42.743.798,00	(4.763.528,00)	(11,14)
8.1.08.01.10.0006	Beban Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	8.256.917,00	14.341.541,00	(6.084.624,00)	(42,43)
8.1.08.01.10.0007	Beban Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	10.722.828,00	18.428.749,00	(7.705.921,00)	(41,81)
8.1.08.02	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	179.358.744,00	177.488.013,00	1.870.731,00	1,05
8.1.08.02.01	Beban Penyusutan Bangunan Gedung	176.357.984,00	174.487.253,00	1.870.731,00	1,07
8.1.08.02.01.0001	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	139.680.169,00	139.954.100,00	(273.931,00)	(0,20)
8.1.08.02.01.0009	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	16.051.027,00	13.906.365,00	2.144.662,00	15,42
8.1.08.02.01.0032	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	1.135.000,00	1.135.000,00	0,00	0,00
8.1.08.02.01.0037	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	19.491.788,00	19.491.788,00	0,00	0,00
8.1.08.02.02	Beban Penyusutan Monumen	2.000.760,00	2.000.760,00	0,00	0,00
8.1.08.02.02.0002	Beban Penyusutan Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Tugu	2.000.760,00	2.000.760,00	0,00	0,00
8.1.08.02.04	Beban Penyusutan Tugu Titik Kontrol/Pasti	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
8.1.08.02.04.0004	Beban Penyusutan Tugu/Tanda Batas-Pagar	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
8.1.08.03	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	1.121.111.174,00	1.030.465.001,00	90.646.173,00	8,80
8.1.08.03.01	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	458.884.577,00	399.635.423,00	59.249.154,00	14,83
8.1.08.03.01.0005	Beban Penyusutan Jalan-Jalan Desa	458.884.577,00	393.782.005,00	65.102.572,00	16,53
8.1.08.03.01.0010	Beban Penyusutan Jalan-Jalan Lainnya	0,00	5.853.418,00	(5.853.418,00)	(100,00)
8.1.08.03.02	Beban Penyusutan Bangunan Air	628.747.706,00	597.350.699,00	31.397.007,00	5,26

8.1.08.03.02.0028	Beban Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	628.747.706,00	597.350.699,00	31.397.007,00	5,26
8.1.08.03.03	Beban Penyusutan Instalasi	26.912.225,00	26.912.213,00	12,00	0,00
8.1.08.03.03.0040	Beban Penyusutan Instalasi Pengaman-Instalasi Pengaman Penangkal Petir	2.953.500,00	2.953.500,00	0,00	0,00
8.1.08.03.03.0044	Beban Penyusutan Instalasi Lain-Instalasi Lain	23.958.725,00	23.958.713,00	12,00	0,00
8.1.08.03.04	Beban Penyusutan Jaringan	6.566.666,00	6.566.666,00	0,00	0,00
8.1.08.03.04.0001	Beban Penyusutan Jaringan Air Minum-Jaringan Pembawa	6.566.666,00	6.566.666,00	0,00	0,00
8.1.08.04	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0,00	312.500,00	(312.500,00)	100,00
8.1.08.04.01	Beban Penyusutan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	0,00	312.500,00	(312.500,00)	100,00
8.1.08.04.01.0001	Beban Penyusutan Barang Bercorak Kesenian-Alat Musik	0,00	312.500,00	(312.500,00)	100,00
	JUMLAH Beban Penyusutan dan Amortisasi	1.488.146.417,00	1.409.599.222,00	78.547.195,00	5,57
	JUMLAH BEBAN	10.603.896.233,00	10.335.308.920,00	268.587.313,00	2,60
	SURPLUS/DEFISIT-LO	(10.603.896.233,00)	(10.335.308.920,00)	(268.587.313,00)	2,60

Berdasarkan tabel di atas, besaran beban operasional Kecamatan Negara bertambah sebesar Rp. 268.587.313,00 pada tahun 2025 jika dibandingkan dengan tahun 2024. Beban ini merupakan akumulasi dari kenaikan/penurunan pada beban pegawai, beban barang jasa, dan beban penyusutan.

Beban Pegawai tahun 2025 sebesar Rp.6.006.048.224,00 terdiri dari Beban Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp.3.139.746.280,00 dan Beban Tambahan Penghasilan ASN sebesar Rp.2.866.301.944,00. Nilai beban pegawai mengalami penurunan dikarenakan ada Pegawai ASN yang pensiun di tahun 2024 .

Kemudian Beban Barang dan Jasa mengalami kenaikan tahun 2025 dengan anggaran sebesar Rp. 3.109.701.592,00 terdiri dari Beban Barang sebesar Rp. 840.401.897,00, Beban Jasa Rp. 1.778.457.480,00, Beban Pemeliharaan sebesar Rp. 178.840.615,00, Beban Perjalanan Dinas sebesar Rp. 79.751.600,00, Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak

Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebesar Rp. 232.250.000,00. Adapun rincian Beban Barang dapat dilihat pada tabel di atas. Beban Barang Pakai Habis sebesar Rp.840.401.897,00, sedangkan belanja barang pakai habis sebesar Rp.861.146.671,00 sehingga terdapat selisih sebesar Rp.20.744.774,00. Hal ini merupakan selisih beban persediaan, dimana persediaan tahun lalu yang menjadi persediaan awal tahun 2025 sebesar Rp. 1.145.200,00 dan persediaan akhir tahun 2025 sebesar Rp. 1.097.898,00.

Selanjutnya, untuk Beban Jasa sebesar Rp. 1.778.457.480,00 diperoleh dari Beban Jasa Kantor sebesar Rp. 1.701.737.480,00, Beban Sewa Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 76.720.000,00.

Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 29.044.615,00, Beban Perjalanan Dinas sebesar Rp.79.751.600,00 dan Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebesar 232.250.000,00. Sementara untuk Beban Penyusutan dan amortisasi sebesar Rp.1.488.146.417,00 yang merupakan Beban penyusutan peralatan dan mesin, dengan rincian sesuai tabel di atas.

4.3 Pos-Pos Neraca

1. Aset

Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang.

Tabel 9. Laporan Neraca Kecamatan Negara Tahun Anggaran 2025

Kode Rekening	Uraian	2024	2023
1	2	3	4
1	ASET	20.812.579.610,35	21.277.909.329,35
1.1	ASET LANCAR	1.097.898,00	1.145.200,00
1.1.12	Persediaan	1.097.898,00	1.145.200,00
1.1.12.01	Barang Pakai Habis	1.097.898,00	1.145.200,00
1.1.12.01.03	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	1.097.898,00	1.145.200,00
1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor	150.500,00	10.000,00

1.1.12.01.03.0002	Kertas dan Cover	739.398,00	757.200,00
1.1.12.01.03.0004	Benda Pos	0,00	300.000,00
1.1.12.01.03.0006	Bahan Komputer	208.000,00	55.000,00
1.1.12.01.03.0013	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	0,00	23.000,00
	JUMLAH ASET LANCAR	1.097.898,00	1.145.200,00
1.3	ASET TETAP	20.589.981.712,35	21.055.264.129,35
1.3.01	Tanah	7.278.980.700,00	7.246.980.700,00
1.3.01.01	Tanah	7.278.980.700,00	7.246.980.700,00
1.3.01.01.01	Tanah Persil	1.617.451.200,00	1.585.451.200,00
1.3.01.01.01.0004	Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	1.616.987.200,00	1.584.987.200,00
1.3.01.01.01.0006	Tanah untuk Bangunan Tempat Ibadah	464.000,00	464.000,00
1.3.01.01.03	Lapangan	5.661.529.500,00	5.661.529.500,00
1.3.01.01.03.0007	Tanah untuk Jalan	461.409.500,00	461.409.500,00
1.3.01.01.03.0013	Tanah untuk Taman	5.200.120.000,00	5.200.120.000,00
1.3.02	Peralatan dan Mesin	2.711.531.743,00	2.500.471.743,00
1.3.02.02	Alat Angkutan	1.012.888.500,00	842.888.500,00
1.3.02.02.01	Alat Angkutan Darat Bermotor	1.012.888.500,00	842.888.500,00
1.3.02.02.01.0002	Kendaraan Bermotor Penumpang	195.900.000,00	195.900.000,00
1.3.02.02.01.0003	Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	170.000.000,00	0,00
1.3.02.02.01.0004	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	406.403.000,00	406.403.000,00
1.3.02.02.01.0005	Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	240.585.500,00	240.585.500,00
1.3.02.03	Alat Bengkel dan Alat Ukur	11.400.000,00	11.400.000,00
1.3.02.03.03	Alat Ukur	11.400.000,00	11.400.000,00
1.3.02.03.03.0001	Alat Ukur Universal	11.400.000,00	11.400.000,00
1.3.02.05	Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.015.436.070,00	995.900.070,00
1.3.02.05.01	Alat Kantor	411.416.475,00	391.880.475,00
1.3.02.05.01.0001	Mesin Ketik	2.040.000,00	2.040.000,00
1.3.02.05.01.0004	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	110.413.475,00	110.413.475,00
1.3.02.05.01.0005	Alat Kantor Lainnya	298.963.000,00	279.427.000,00
1.3.02.05.02	Alat Rumah Tangga	538.635.595,00	538.635.595,00
1.3.02.05.02.0001	Mebel	135.425.000,00	135.425.000,00
1.3.02.05.02.0003	Alat Pembersih	43.600.000,00	43.600.000,00
1.3.02.05.02.0004	Alat Pendingin	195.448.845,00	195.448.845,00
1.3.02.05.02.0006	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	164.161.750,00	164.161.750,00
1.3.02.05.03	Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	65.384.000,00	65.384.000,00
1.3.02.05.03.0001	Meja Kerja Pejabat	49.948.000,00	49.948.000,00
1.3.02.05.03.0003	Kursi Kerja Pejabat	15.436.000,00	15.436.000,00
1.3.02.06	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	35.830.000,00	35.830.000,00
1.3.02.06.02	Alat Komunikasi	26.330.000,00	26.330.000,00

1.3.02.06.02.0001	Alat Komunikasi Telephone	26.330.000,00	26.330.000,00
1.3.02.06.03	Peralatan Pemancar	9.500.000,00	9.500.000,00
1.3.02.06.03.0020	Switcher/Menara Antena	9.500.000,00	9.500.000,00
1.3.02.10	Komputer	573.477.173,00	551.953.173,00
1.3.02.10.01	Komputer Unit	364.713.173,00	346.186.173,00
1.3.02.10.01.0002	Personal Computer	364.713.173,00	346.186.173,00
1.3.02.10.02	Peralatan Komputer	208.764.000,00	205.767.000,00
1.3.02.10.02.0003	Peralatan Personal Computer	104.549.000,00	101.552.000,00
1.3.02.10.02.0004	Peralatan Jaringan	104.215.000,00	104.215.000,00
1.3.02.19	Peralatan Olahraga	62.500.000,00	62.500.000,00
1.3.02.19.01	Peralatan Olahraga	62.500.000,00	62.500.000,00
1.3.02.19.01.0002	Peralatan Permainan	4.500.000,00	4.500.000,00
1.3.02.19.01.0006	Peralatan Olahraga Lainnya	58.000.000,00	58.000.000,00
1.3.03	Gedung dan Bangunan	9.236.808.500,00	8.691.308.500,00
1.3.03.01	Bangunan Gedung	9.086.770.500,00	8.541.270.500,00
1.3.03.01.01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	9.086.770.500,00	8.541.270.500,00
1.3.03.01.01.0001	Bangunan Gedung Kantor	7.115.829.000,00	6.915.829.000,00
1.3.03.01.01.0009	Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	944.042.000,00	598.542.000,00
1.3.03.01.01.0032	Bangunan Fasilitas Umum	56.750.000,00	56.750.000,00
1.3.03.01.01.0037	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	970.149.500,00	970.149.500,00
1.3.03.02	Monumen	100.038.000,00	100.038.000,00
1.3.03.02.01	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	100.038.000,00	100.038.000,00
1.3.03.02.01.0002	Tugu	100.038.000,00	100.038.000,00
1.3.03.04	Tugu Titik Kontrol/Pasti	50.000.000,00	50.000.000,00
1.3.03.04.01	Tugu/Tanda Batas	50.000.000,00	50.000.000,00
1.3.03.04.01.0004	Pagar	50.000.000,00	50.000.000,00
1.3.04	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	11.790.009.203,35	11.482.805.203,35
1.3.04.01	Jalan dan Jembatan	4.706.043.948,35	4.508.514.898,35
1.3.04.01.01	Jalan	4.706.043.948,35	4.508.514.898,35
1.3.04.01.01.0005	Jalan Desa	4.706.043.948,35	4.508.514.898,35
1.3.04.02	Bangunan Air	6.348.720.782,00	6.239.045.832,00
1.3.04.02.04	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	6.348.720.782,00	6.239.045.832,00
1.3.04.02.04.0004	Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	6.348.720.782,00	6.239.045.832,00
1.3.04.03	Instalasi	538.244.473,00	538.244.473,00
1.3.04.03.09	Instalasi Pengaman	59.070.000,00	59.070.000,00
1.3.04.03.09.0001	Instalasi Pengaman Penangkal Petir	59.070.000,00	59.070.000,00
1.3.04.03.10	Instalasi Lain	479.174.473,00	479.174.473,00
1.3.04.03.10.0001	Instalasi Lain	479.174.473,00	479.174.473,00
1.3.04.04	Jaringan	197.000.000,00	197.000.000,00
1.3.04.04.01	Jaringan Air Minum	197.000.000,00	197.000.000,00

1.3.04.04.01.0001	Jaringan Pembawa	197.000.000,00	197.000.000,00
1.3.05	Aset Tetap Lainnya	24.096.000,00	24.096.000,00
1.3.05.02	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga	24.096.000,00	24.096.000,00
1.3.05.02.01	Barang Bercorak Kesenian	19.096.000,00	19.096.000,00
1.3.05.02.01.0003	Alat Peraga Kesenian	19.096.000,00	19.096.000,00
1.3.05.02.02	Alat Bercorak Kebudayaan	5.000.000,00	5.000.000,00
1.3.05.02.02.0004	Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya	5.000.000,00	5.000.000,00
1.3.07	Akumulasi Penyusutan	(10.451.444.434,00)	(8.890.398.017,00)
1.3.07.01	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(2.404.302.803,00)	(2.216.626.304,00)
1.3.07.01.02	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan	(859.078.976,00)	(808.519.145,00)
1.3.07.01.02.0002	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	(195.900.000,00)	(195.900.000,00)
1.3.07.01.02.0003	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	(16.190.476,00)	0,00
1.3.07.01.02.0004	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	(406.403.000,00)	(406.403.000,00)
1.3.07.01.02.0005	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	(240.585.500,00)	(206.216.145,00)
1.3.07.01.03	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur	(11.400.000,00)	(10.292.500,00)
1.3.07.01.03.0024	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Ukur Universal	(11.400.000,00)	(10.292.500,00)
1.3.07.01.05	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	(912.774.911,00)	(833.725.758,00)
1.3.07.01.05.0001	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Mesin Ketik	(2.040.000,00)	(2.040.000,00)
1.3.07.01.05.0004	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	(104.913.475,00)	(100.933.475,00)
1.3.07.01.05.0005	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	(233.118.983,00)	(190.044.782,00)
1.3.07.01.05.0006	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Mebel	(127.921.250,00)	(122.307.917,00)
1.3.07.01.05.0008	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	(43.600.000,00)	(41.639.999,00)
1.3.07.01.05.0009	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	(173.152.120,00)	(156.300.503,00)
1.3.07.01.05.0011	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	(162.645.083,00)	(155.575.082,00)
1.3.07.01.05.0013	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat	(49.948.000,00)	(49.948.000,00)
1.3.07.01.05.0015	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat	(15.436.000,00)	(14.936.000,00)
1.3.07.01.06	Akumulasi Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	(35.830.000,00)	(35.830.000,00)

1.3.07.01.06.0007	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone	(26.330.000,00)	(26.330.000,00)
1.3.07.01.06.0037	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Switcher/Menara Antena	(9.500.000,00)	(9.500.000,00)
1.3.07.01.10	Akumulasi Penyusutan Komputer	(522.718.916,00)	(465.758.901,00)
1.3.07.01.10.0002	Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Personal Computer	(323.821.931,00)	(285.841.661,00)
1.3.07.01.10.0006	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	(95.403.251,00)	(87.146.334,00)
1.3.07.01.10.0007	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	(103.493.734,00)	(92.770.906,00)
1.3.07.01.19	Akumulasi Penyusutan Peralatan Olahraga	(62.500.000,00)	(62.500.000,00)
1.3.07.01.19.0002	Akumulasi Penyusutan Peralatan Olahraga-Peralatan Permainan	(4.500.000,00)	(4.500.000,00)
1.3.07.01.19.0006	Akumulasi Penyusutan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Lainnya	(58.000.000,00)	(58.000.000,00)
1.3.07.02	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(2.470.862.508,00)	(2.218.603.764,00)
1.3.07.02.01	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung	(2.444.353.388,00)	(2.195.095.404,00)
1.3.07.02.01.0001	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	(1.983.372.449,00)	(1.843.692.280,00)
1.3.07.02.01.0009	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	(233.881.787,00)	(144.930.760,00)
1.3.07.02.01.0032	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	(13.415.000,00)	(12.280.000,00)
1.3.07.02.01.0037	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	(213.684.152,00)	(194.192.364,00)
1.3.07.02.02	Akumulasi Penyusutan Monumen	(24.009.120,00)	(22.008.360,00)
1.3.07.02.02.0002	Akumulasi Penyusutan Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Tugu	(24.009.120,00)	(22.008.360,00)
1.3.07.02.04	Akumulasi Penyusutan Tugu Tanda Batas	(2.500.000,00)	(1.500.000,00)
1.3.07.02.04.0004	Akumulasi Penyusutan Tugu Tanda Batas-Pagar	(2.500.000,00)	(1.500.000,00)
1.3.07.03	Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	(5.552.183.123,00)	(4.431.071.949,00)
1.3.07.03.01	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	(2.365.331.013,00)	(1.906.446.436,00)
1.3.07.03.01.0005	Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Desa	(2.336.440.842,00)	(1.877.556.265,00)
1.3.07.03.01.0010	Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Lainnya	(28.890.171,00)	(28.890.171,00)
1.3.07.03.02	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air	(2.872.439.628,00)	(2.243.691.922,00)
1.3.07.03.02.0025	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	14.699.097,00	14.699.097,00

1.3.07.03.02.0028	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	(2.887.138.725,00)	(2.258.391.019,00)
1.3.07.03.03	Akumulasi Penyusutan Instalasi	(281.031.930,00)	(254.119.705,00)
1.3.07.03.03.0040	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pengaman-Instalasi Pengaman Penangkal Petir	(59.070.000,00)	(56.116.500,00)
1.3.07.03.03.0044	Akumulasi Penyusutan Instalasi Lain-Instalasi Lain	(221.961.930,00)	(198.003.205,00)
1.3.07.03.04	Akumulasi Penyusutan Jaringan	(33.380.552,00)	(26.813.886,00)
1.3.07.03.04.0001	Akumulasi Penyusutan Jaringan Air Minum-Jaringan Pembawa	(33.380.552,00)	(26.813.886,00)
1.3.07.04	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(24.096.000,00)	(24.096.000,00)
1.3.07.04.01	Akumulasi Penyusutan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	(24.096.000,00)	(24.096.000,00)
1.3.07.04.01.0001	Akumulasi Penyusutan Barang Bercorak Kesenian-Alat Musik	(24.096.000,00)	(24.096.000,00)
	JUMLAH ASET TETAP	20.589.981.712,35	21.055.264.129,35
1.5	ASET LAINNYA	221.500.000,00	221.500.000,00
1.5.04	Aset Lain-lain	315.000.000,00	315.000.000,00
1.5.04.01	Aset Lain-lain	315.000.000,00	315.000.000,00
1.5.04.01.01	Aset Lain-lain	315.000.000,00	315.000.000,00
1.5.04.01.01.0002	Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	315.000.000,00	315.000.000,00
1.5.06	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(93.500.000,00)	(93.500.000,00)
1.5.06.01	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(93.500.000,00)	(93.500.000,00)
1.5.06.01.02	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	(93.500.000,00)	(93.500.000,00)
1.5.06.01.02.0002	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain-Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	(93.500.000,00)	(93.500.000,00)
	JUMLAH ASET LAINNYA	221.500.000,00	221.500.000,00
1.5	ASET LAINNYA	221.500.000,00	221.500.000,00
	JUMLAH PROPERTI INVESTASI	0,00	0,00
	JUMLAH ASET	20.812.579.610,35	21.277.909.329,35
2	KEWAJIBAN	3.998.143,00	9.373.652,00
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	3.998.143,00	9.373.652,00
2.1.06	Utang Belanja	3.998.143,00	9.373.652,00
2.1.06.01	Utang Belanja Pegawai	0,00	4.543.896,00

2.1.06.01.01	Utang Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	0,00	4.543.896,00
2.1.06.01.01.0013	Utang Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN-PPh/Tunjangan Khusus PNS	0,00	4.543.896,00
2.1.06.02	Utang Belanja Barang dan Jasa	3.998.143,00	4.829.756,00
2.1.06.02.02	Utang Belanja Jasa	3.998.143,00	4.829.756,00
2.1.06.02.02.0059	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon	2.325.862,00	2.979.942,00
2.1.06.02.02.0060	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	1.318.000,00	1.524.000,00
2.1.06.02.02.0061	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	354.281,00	325.814,00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	3.998.143,00	9.373.652,00
	JUMLAH KEWAJIBAN	3.998.143,00	9.373.652,00
3	EKUITAS	20.808.581.467,35	21.268.535.677,35
3.1	EKUITAS	20.808.581.467,35	21.268.535.677,35
3.1.01	Ekuitas	10.826.239.444,35	11.570.894.805,35
3.1.01.01	Ekuitas	21.430.135.677,35	21.906.203.725,35
3.1.01.01.01	Ekuitas	21.430.135.677,35	21.906.203.725,35
3.1.01.01.01.0001	Ekuitas	21.430.135.677,35	21.906.203.725,35
3.1.01.02	Surplus/Defisit-LO	(10.603.896.233,00)	(10.335.308.920,00)
3.1.01.02.01	Surplus/Defisit-LO	(10.603.896.233,00)	(10.335.308.920,00)
3.1.01.02.01.0001	Surplus/Defisit-LO	(10.603.896.233,00)	(10.335.308.920,00)
3.1.03	Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	9.982.342.023,00	9.697.640.872,00
3.1.03.01	RK PPKD	9.982.342.023,00	9.697.640.872,00
3.1.03.01.01	RK PPKD	9.982.342.023,00	9.697.640.872,00
3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	9.982.342.023,00	9.697.640.872,00
	JUMLAH EKUITAS	20.808.581.467,35	21.268.535.677,35
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	20.812.579.610,35	21.277.909.329,35

Pada tahun 2025 jumlah aset tetap mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2024. Hal ini disebabkan tidak terdapat belanja modal pengadaan barang/jasa dan juga tidak terdapat mutasi masuk maupun keluar atas aset tetap dan aset lainnya. Penurunan nilai aset tetap disebabkan oleh adanya akumulasi penyusutan peralatan dan mesin, yang terdiri atas Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur, Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga, Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan, Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung, Akumulasi Penyusutan Komputer. Berikut untuk Utang Belanja

Pegawai berupa utang pajak gaji ke 13 Tahun 2024 sebesar Rp. 4.543.896,00 sudah di bayarkan pada tanggal 21 pebruari 2025. Rincian nilai asset lancar, asset tetap, asset lainnya, kewajiban dan ekuitas dapat dilihat pada tabel di atas.

1. Kewajiban

Kewajiban merupakan utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

URAIAN	2025 (Rp)	2024 (Rp)
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	3.998.143,00	9.373.652,00
Utang Belanja	3.998.143,00	9.373.652,00
Utang Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	0,00	4.543.896,00
Utang Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN-PPh/Tunjangan Khusus PNS	0,00	4.543.896,00
Utang Belanja Barang dan Jasa	0,00	4.829.756,00
Utang Belanja Jasa	3.998.143,00	4.829.756,00
Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon	2.325.862,00	2.979.942,00
Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	1.318.000,00	1.524.000,00
Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	354.281,00	325.814,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	3.998.143,00	9.373.652,00
JUMLAH KEWAJIBAN	3.998.143,00	9.373.652,00

Dari Tabel diatas OPD Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana pada Tahun 2025 terdapat Utang Belanja sebesar Rp. 3.998.143,00 (Tiga Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Seratus Empat Puluh Tiga Rupiah) mengalami penurunan Tahun 2024 terdapat Utang Belanja sebesar Rp. 9.373.652,00 (Sembilan Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Lima Puluh Dua Rupiah), rincian Utang Belanja Tahun 2025 sebagai berikut :

- a. Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon Rp. 2.325.862,00 (Dua Juta Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Dua Rupiah)
- b. Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air Rp. 1.318.000,00 (Satu Juta Tiga Ratus Delapan Belas Ribu Rupiah)

- c. Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik Rp. 354.281,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Empat Ribu Dua Ratus Empat Belas Rupiah)

2. Ekuitas

Ekuitas merupakan kekayaan bersih OPD Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana yaitu selisih antara jumlah nilai asset dengan jumlah nilai kewajiban dengan rincian sebagai berikut :

URAIAN	2025	2024
EKUITAS	20.808.581.467,35	21.268.535.677,35
Ekuitas	(10.826.239.444,35)	(11.570.894.805,35)
RK PPKD	9.982.342.023,00	9.697.640.872,00

OPD Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana pada Tahun 2025 memiliki kekayaan sebesar Rp. 20.808.581.467,35 (Dua Puluh Miliar Delapan Ratus Delapan Juta Lima Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah Tiga Puluh Lima Sen) Mengalami penurunan di tahun 2024 sebesar Rp. 21.268.535.677,35 (Dua Puluh Satu Miliar Dua Ratus Enam Puluh Delapan Juta Lima Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah Tiga Puluh Lima Sen) Rincian kekayaan/ekuitas tahun 2025 sebagai berikut :

- Ekuitas pada tahun 2025 sebesar Rp. 10.826.239.444,35
- RK PPKD pada tahun 2025 sebesar Rp. 9.982.342.023,00

4.4 Laporan Perubahan Ekuitas 2025

Laporan keuangan yang merinci kenaikan atau penurunan jumlah pemilik (ekuitas/modal) suatu perusahaan selama periode akuntansi tertentu, disebabkan oleh laba bersih, rugi bersih, setoran modal, penarikan modal oleh pemilik, atau transaksi lain seperti dividen, menunjukkan perubahan kekayaan bersih dari awal hingga akhir periode. Laporan Ekuitas Tahun 2025 pada OPD Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana seperti Tabel 10 dibawah ini.

Tabel 10, Laporan Perubahan Ekuitas Kecamatan Negara Tahun 2025

NO	URAIAN	2025	2024
1	2	3	4
1	EKUITAS AWAL	21.268.535.677,35	21.614.263.776,00
2	SURPLUS / (DEFISIT) - LO	(10.603.896.233,00)	(10.335.308.920,00)
3	RK PPKD	9.982.324.023,00	9.697.640.872,00
4	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR		
	KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0,00	0,00
	KOREKSI SELISIH REVALUASI ASET TETAP	0,00	0,00
	LAIN-LAIN	161.600.000,00	291.939.949,35
	Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	32.000.000,00	
	Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	202.500.000,00	
	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	(72.900.000,00)	
5	EKUITAS AKHIR	20.808.581.467,35	21.268.535.677,35

OPD Kecamatan Negara pada Perubahan Ekuitas yaitu Ekuitas Awal sebesar Rp. 21.268.535.677,35 dan Ekuitas Akhir sebesar Rp. 20.808.581.467,35

4.5 Pengungkapan Atas Pos-Pos Aset Dan Kewajiban Yang Timbul Sehubungan Dengan Penerapan Basis Akrua! Atas Pendapatan Dan Belanja Dan Rekonsiliasinya Dengan Penerapan Basis Kas, Untuk Etintas Akuntansi atau Pelaporan Menggunakan Basis Akrua! Pada OPD Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana.

1. Aset Lancar

Total Aset Lancar pada OPD Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana per 31 Desember 2025, Rp. 1.097.898,00

2. Aset Tetap

Total Aset tetap pada OPD Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana per 31 Desember 2025, Rp. 20.589.981.712,35

3. Aset lainnya

Total Aset lainnya pada OPD Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana per 31 Desember 2025, Rp. 221.500.000,00

3. Kewajiban

Total Kewajiban pada OPD Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana per 31 Desember 2025, Rp. 3.998.143,00

4. Ekuitas

Total ekuitas pada OPD Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana per 31 Desember 2025, Rp. 20.808.581.467,35

BAB V

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

1. Dalam rangka pelaksanaan APBD TA 2025 pada OPD Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana, ditetapkan Pengguna Anggaran sebagai berikut :
 - Camat Negara, berdasarkan SK Bupati Jembrana Nomor : 1/BPKAD/2025, tanggal 2 Januari 2025 tentang Penetapan Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah, Pejabat Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana Tahun 2025.
2. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Jembrana Nomor 3/BPKAD/2025, tanggal 2 Januari 2025, tentang Penetapan Uang Persediaan Masing-Masing Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2025, Uang Persediaan untuk OPD Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana ditetapkan sebesar Rp. 165.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah).
3. Jumlah SP2D yang dicairkan sampai dengan 31 Desember 2025 adalah Rp. 9.982.342.023,- (Sembilan Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Juta Tiga Ratus Empat Puluh Dua Ribu Dua Puluh Tiga Rupiah).

BAB VI PENUTUP

Laporan Keuangan OPD Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana secara lebih rinci kami sajikan dalam Laporan Realisasi APBD Tahun 2025 dan Neraca OPD Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana per 31 Desember 2025.

Demikian gambaran atas Pelaksanaan APBD pada OPD Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2025 dapat kami sampaikan sebagai pertanggungjawaban dan bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan dalam menetapkan strategi dan prioritas pembangunan di Kabupaten Jembrana.



Negara, 31 Desember 2025
Camat Negara,

 **GEDE WARIYANA PRABAWA, S.STP., M.M.**

Pembina/IVa

NIP. 19861230 200602 1 001